

## Implikasi Prasasti dan Kekuasaan Pada Masa Jawa Kuna

Siti Maziyah<sup>1\*)</sup>

<sup>1</sup>*Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro,  
Jl. Prof. Soedarto, SH, Kampus Undip Tembalang, Semarang, Indonesia*

\*Korespondensi: mazy\_muiz@yahoo.com

### Abstract

*Aim the research was to know implication of inscriptions and power of the king in Old Java. This article used historical method with archaeological approach. There are to collect the inscriptions in IX until XV centuries, translated them, interpretation, and historiography. Outcome the research was indicated that inscriptions can useful for showed power of the king, especially given the anugerah from his people to got loyalties them.*

**Key words:** *inscriptions; power of the king; Old Java; anugerah; loyalties*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implikasi prasasti dan kekuasaan raja di Jawa Kuna. Artikel ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan arkeologi. Dimulai dengan mengumpulkan prasasti-prasasti pada abad IX hingga abad XV, menerjemahkannya, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prasasti dapat berguna untuk menunjukkan kekuasaan raja, terutama pemberian anugerah raja kepada rakyatnya untuk mendapat loyalitas mereka.

**Kata kunci:** prasasti; kekuasaan raja; Jawa Kuna; anugerah; loyalitas

## I. Pendahuluan

Masa Jawa Kuna adalah suatu masa ketika bahasa Jawa Kuna banyak digunakan sebagai alat komunikasi oleh masyarakat suku bangsa Jawa pada sekitar awal abad IX M sampai dengan abad XV M.<sup>1</sup> Bahasa Jawa Kuna termasuk rumpun bahasa yang dikenal sebagai bahasa-bahasa Nusantara dan merupakan sub-bagian dari kelompok linguistik Austronesia. Secara kasar bahasa-bahasa di Nusantara meliputi 250 macam bahasa, dan bahasa Jawa Kuna menduduki tempat istimewa karena karya-karya sastranya yang menonjol, yang berasal dari abad IX M dan ke X M. Ada dua sifat yang nampak pada bahasa tersebut, *pertama*, terdapat banyak kata-kata yang berasal dari bahasa Sansekerta; *kedua*, meskipun terdapat pengaruh bahasa Sansekerta, yang secara linguistik termasuk rumpun bahasa yang berbeda sama sekali, namun bahasa Jawa Kuna dalam segala susunan dan ciri-ciri pokoknya tetap merupakan suatu bahasa Nusantara (Zoetmulder, 1985:8).

Bahasa Sansekerta merupakan salah satu rumpun bahasa tertua di dunia. Dalam penggunaannya hampir sama dengan struktur tata bahasa Arab yang mengenal jenis kelamin (*feminine, maskulin, neutrum*); mengenal bentuk tunggal (*singularis*), bentuk jamak (*pluralis*), bentuk ganda (*dualis*); dan

---

<sup>1</sup>Prasasti tertua berbahasa Jawa Kuna adalah prasasti Sukabumi yang ditemukan berpenanggalan 25 Maret tahun 804 M. Periksa: P.J. Zoetmulder, *Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*, Cetakan II, Jakarta: Djambatan, 1985, hlm. 1-7.

mengenal delapan kasus (*nominatif, akusatif, instrumentalis, datif, ablatif, genitif, lokatif, dan vokatif*) (Soebadio, 1983:9-10.).

Menurut Gonda (1952:115.), secara linguistis pengaruh India terhadap daerah-daerah Indonesia yang mengalami proses Hinduisasi tidak mengakibatkan semacam pembauran antara bahasa India sehari-hari dan salah satu idiom bahasa Nusantara, melainkan suatu bahasa Nusantara yang diperkaya dengan penambahan dan pencampuran kata-kata Sansekerta serta sejumlah kecil kata-kata Indo-Arya yang lebih muda. Pada kenyataannya, kata-kata pinjaman dari bahasa Sansekerta itu hampir semuanya bersifat kata-kata benda dan kata-kata sifat dalam bentuknya yang tidak dapat dideklinasikan<sup>2</sup> atau merupakan perkataan dalam bentuk *lingga*.<sup>3</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa unsur-unsur bahasa Sansekerta itu dibaurkan ke dalam bahasa Jawa Kuna sedemikian rupa, sehingga susunan dan sifatnya sebagai suatu bahasa Nusantara tetap utuh.

Pengetahuan mengenai masa Jawa Kuna dapat diketahui berdasarkan tinggalan-tinggalan prasasti yang ditulis di atas batu atau lempengan logam (tembaga, perunggu, atau emas) maupun kitab-kitab kesusastaan yang menggunakan bahasa Jawa Kuna. Tulisan-tulisan itu biasanya menyebutkan tanggal dikeluarkannya prasasti maupun kitab kesusastaan melalui sebuah sistem yang rumit yang berkaitan dengan gejala-gejala astronomis (Brandes, 1913; Boechari dan Wibowo, 1986). Zoetmulder (2000:850) menyatakan bahwa kata prasasti merupakan bentuk “penjawaan” dari kata *pra asti* yang berasal dari bahasa Sansekerta, dan mendefinisikannya sebagai ‘piagam’, ‘inskripsi’, atau ‘pengumuman pemerintah’. Melihat pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa prasasti bukanlah sembarang tulisan yang tidak mempunyai makna tertentu, akan tetapi, merupakan suatu keputusan atau ketetapan dari seorang penguasa. Permasalahan yang muncul adalah apa dan bagaimanakah sebenarnya prasasti pada masa Jawa Kuna itu? Siapa sajakah yang berhak mengeluarkan prasasti, dan apakah tujuan mereka mengeluarkan prasasti?

## II. Metode Penelitian

Penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan data berupa prasasti-prasasti berbahasa Jawa Kuna yang berasal dari abad IX M sampai abad XV M yang sudah ditrasliterasi dalam bentuk huruf Latin dan sudah diterbitkan menjadi buku kumpulan prasasti. Selanjutnya dipilih prasasti yang memiliki data yang utuh dan terbaca semua informasi yang terdapat didalamnya. Setelah dilakukan pembacaan dan penerjemahan, tahap selanjutnya adalah interpretasi data, yaitu menafsirkan dan mensintesakan data agar dapat dianalisis dan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang telah diajukan. Dari tahap ini diharapkan dapat tergalikan fakta-fakta yang telah terjadi di masa lampau dalam sejarah bangsa Indonesia untuk direkonstruksi dalam suatu penulisan ilmiah.

---

<sup>2</sup>Deklinasi adalah fleksi yang dilakukan pada kata benda, kata sifat, kata ganti, dan kata sifat-pronominal (Soebadio, 1983:9).

<sup>3</sup>*Lingga* adalah kata dasar, misalnya: *dewa, utama, marga*, dan sebagainya (Zoetmulder, 1985:9-12).

### III. Hasil Dan Pembahasan

#### A. Pengertian Prasasti

Prasasti adalah sumber tulisan sejarah yang berasal dari tinggalan masa lampau yang biasanya tertulis di atas batu, lempengan logam (emas, perak, atau tembaga),<sup>4</sup> gerabah, batu-bata, atau lontar.<sup>5</sup> Pada umumnya prasasti-prasasti itu merupakan semacam piagam untuk memperingati peristiwa penting pada suatu kerajaan, misalnya *yupa* di Kutai memperingati kedermawanan Raja Mulawarman dalam memberikan sumbangan untuk upacara-upacara keagamaan di kerajaannya (Poesponegoro, 1993: 29-34). Adapun prasasti-prasasti yang ditemukan di Kerajaan Mataram Hindu sebagian besar berisi tentang penetapan sebidang tanah atau suatu daerah menjadi berstatus *sima*, yaitu daerah bebas pajak sebagai anugerah raja kepada seorang pejabat kerajaan; atau kepada rakyat yang telah berjasa kepada kerajaan; atau sebagai anugerah raja untuk kepentingan pendirian bangunan suci. Penetapan *sima* baru pada umumnya dianggap sebagai peristiwa yang penting sekali, karena yang terjadi adalah perubahan kedudukan sebidang tanah yang dalam hubungan religio-magis di kalangan masyarakat Indonesia selalu terkait dengan yang mendiami tanah itu (Boechari, 1977).

Berikut ini contoh prasasti yang terbuat dari berbagai batu dan tembaga:



Gambar 1. Prasasti Hariñjing 804 M Terbuat dari Batu  
(Sumber: Wurjantoro, 2012:3)

<sup>4</sup>Prasasti yang ditulis di atas logam disebut sebagai *tamra prasasti*.

<sup>5</sup>Prasasti yang ditulis di atas lontar disebut sebagai *ripta prasasti* atau *kropak*.



Gambar 2. Prasasti Mantyasih 907 M Terbuat dari Tembaga  
(Sumber: Wurjantoro, 2011:188)

Sebagian kecil dari prasasti-prasasti yang ditemukan di Kerajaan Mataram Hindu berisi tentang keputusan peradilan atau sering disebut sebagai *jayapatra* atau *jayasong* (Poesponegoro dan Notosusasto, 1993). Penyebutan itu didasarkan atas penyebutan kata *jayapatra* atau *jayasong* dalam beberapa prasasti yang berhubungan dengan putusan peradilan, misalnya pada prasasti Guntur 907 M (Wurjantoro, 2011:219-222), prasasti Wurudu Kidul 922 M (Wurjantoro, 2011:234-238), dan prasasti Parung (tt; zaman Majapahit). Kata *jayapatra* berarti catatan kemenangan dalam perkara hukum yang diberikan kepada pihak yang menang (Zoetmulder, 2000:419), sedangkan *jayasong* berarti perlindungan kemenangan atas keputusan hukum (Zoetmulder, 2000:1114). Prasasti-prasasti itu dikeluarkan oleh raja, penguasa daerah (*raka*), pejabat peradilan (*samgat/pamgat*), atau oleh pihak-pihak yang mempunyai wewenang dalam suatu proses peradilan, serta memuat sebuah proses pengambilan keputusan peradilan Jawa Kuna. Dalam proses pengambilan keputusan seperti yang tersurat pada prasasti peradilan itu selalu terlihat adanya pihak-pihak yang bersengketa, pejabat-pejabat peradilan, saksi-saksi, dan putusan yang dibuat. Dengan demikian, sebuah prasasti dapat disebut sebagai prasasti peradilan jika mempunyai dua atau lebih dari unsur-unsur tersebut di atas (Prasodjo, 1987).

Prasasti-prasasti di Indonesia memiliki berbagai macam bentuk huruf dan bahasa, di antaranya adalah huruf Pallawa, Jawa Kuna, Pra-nagari, dan Dewanagari. Sedangkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Sansekerta, Melayu Kuna, Jawa Kuna, dan Bali Kuna. Pada kenyataannya huruf Pallawa masih dapat dibedakan menjadi Pallawa Awal atau Pallawa Kuna dan Pallawa Muda. Sebagai contoh prasasti berhuruf Pallawa Kuna adalah prasasti-prasasti dari Kutai, prasasti-prasasti Purnavarmman dari Tarumanegara, dan beberapa prasasti dari Kedah, Malaysia. Adapun contoh prasasti yang berhuruf Pallawa Muda adalah prasasti Tuk Mas dari Grabag, Jawa Tengah, prasasti-prasasti dari Sriwijaya, dan prasasti Canggal, Jawa Tengah. Prasasti-prasasti yang menggunakan huruf Pallawa itu pada umumnya

menggunakan bahasa Sansekerta, kecuali prasasti dari Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu Kuna.

Prasasti-prasasti yang menggunakan huruf Jawa Kuna juga dapat dibedakan menjadi Jawa Kuna Awal (antara tahun 750 M - 925 M), Jawa Kuna Akhir (antara tahun 925 M-1250 M), dan Jawa Kuna periode Majapahit (antara tahun 1250 M – 1450 M). Prasasti berhuruf Jawa Kuna Awal dibedakan menjadi dua, yaitu fase kuna (antara tahun 750 M – 856 M), dan prasasti Jawa Kuna yang merupakan bentuk standar (antara tahun 856 M – 925 M). Prasasti-prasasti yang berhuruf Jawa Kuna ini pada umumnya menggunakan bahasa Jawa Kuna. Akan tetapi, ada juga yang menggunakan bahasa Melayu Kuna seperti prasasti Bukateja, prasasti Gandasuli I (Sang Hyang Wintang) dan Gandasuli II (Dang Puhawang Glis). Adapun prasasti berhuruf Pra-Nagari (Siddham) dan huruf Dewanagari pada umumnya menggunakan bahasa Sansekerta. Sebagai contoh adalah prasasti Kelurak, dan prasasti Kalasan. Tabel berikut dapat menjelaskan pembagian perkembangan huruf dan bahasa di Jawa Kuna seperti tersebut di atas:

No	Huruf		Periode	Bahasa
	Jenis	Perkembangan		
1.	Pallawa	Pallawa Awal/Kuna	+ Abad V-VII	Sansekerta
		Pallawa Akhir/Muda	+ Abad VII-VIII	Sansekerta Melayu Kuna, Jawa Kuna Awal
2.	Pra-nagari	-	Abad VIII M	Sansekerta
3.	Dewanagari	-	Abad VIII M	Sansekerta
4.	Jawa Kuna	Jawa Kuna Awal	750 M - 950 M	Sansekerta dan Jawa Kuna Awal
		Jawa Kuna Awal fase kuna	750 M – 856 M	Jawa Kuna Awal; Melayu Kuna
		Jawa Kuna bentuk standar	856 M – 925 M	Jawa Kuna standar; Melayu Kuna
		Jawa Kuna Akhir	925 M – 1250 M	Jawa Kuna Akhir
		Jawa Kuna periode Majapahit	1250 M – 1450 M	Jawa Kuna Akhir

(Sumber: diolah dari berbagai pola prasasti)

Penamaan prasasti dapat ditentukan oleh dua hal, yaitu *pertama*, berdasarkan tempat atau daerah ditemukannya prasasti itu, misalnya prasasti Kalasan, prasasti Ratu Boko, prasasti Canggal, dan sebagainya. Pada kasus penamaan seperti ini, berarti prasasti-prasasti itu ditemukan di daerah Kalasan, daerah Ratu Boko, dan daerah Canggal (Muntilan); *kedua*, diambil dari nama tempat yang pertamakali disebut pada prasasti itu, misalnya prasasti Cane, prasasti Telang, dan prasasti Kamalagyan. Pada kasus ini dapat dijelaskan sebagai berikut, Cane adalah tempat yang tertulis di prasasti itu, daerah yang menerima anugerah raja berupa ditetapkannya daerah itu menjadi daerah *sima*. Adapun Telang adalah nama tempat yang pertamakali disebut pada prasasti itu, selain Mahe, dan Papparahun. Prasasti yang dikeluarkan pada abad X M itu mencatat tentang pembuatan tempat penyeberangan di ketiga desa itu yang terletak di tepi Bengawan Solo oleh Rakai Watukura Dyah Balitung. Adapun prasasti Kamalagyan mencatat adanya usaha dari Airlangga untuk menyejahterakan rakyatnya dengan jalan membuat

bendungan pada sungai di wilayah Kamalagyan, agar tidak menyebabkan banjir di daerah sekitarnya (Poesponegoro, dan Notosusasto, 1993).

## B. Struktur Prasasti

Prasasti-prasasti yang dikenal di Indonesia memiliki berbagai macam bentuk struktur. Berdasarkan jumlah kata dan kalimatnya dapat dibedakan menjadi prasasti pendek, sedang, dan panjang, bahkan ada prasasti yang hanya memuat satu kata atau angka tahun saja. Panjang pendeknya jumlah kalimat itu mempengaruhi bentuk struktur prasasti yang bersangkutan. Prasasti pendek pada umumnya terdiri dari dua sampai empat atau kurang dari sepuluh kata. Prasasti ini biasanya menyebut nama tokoh, tanda peringatan atau angka tahun dengan menggunakan *candra sengkala*. Misalnya prasasti pendek yang terdapat di kompleks Candi Plaosan Lor yang hanya berbunyi: “*Dharmma rî Mah r ja.*” Pada kasus ini prasasti itu menunjukkan adanya *dharmma* atau kebaikan yang dilakukan oleh *rî Mah r ja*. Prasasti sedang dan panjang pada umumnya berstruktur sama hanya perbedaannya terletak pada tujuan penulisan prasasti yang mempengaruhi panjangnya kalimat, adapun isinya biasanya tentang penetapan sebidang tanah menjadi berstatus *sima*. Ada juga beberapa prasasti yang berisi peringatan pembuatan bendungan, berisi putusan peradilan, atau berisi peringatan khusus lainnya.

Struktur prasasti yang terdapat pada prasasti panjang dan prasasti sedang, biasanya terdiri dari:

### 1. *Manggala*.

*Manggala* adalah kalimat pembuka yang dituliskan oleh penulis prasasti pada setiap bagian awal prasasti. Ucapan pembuka ini dimaksudkan sebagai kata-kata permohonan keselamatan dan kebahagiaan serta sebagai ucapan pujian kepada para dewata. *Manggala* yang dimaksud sebagai kata-kata permohonan keselamatan dan kebahagiaan biasanya dimulai dengan kata *swasti* (‘selamat berbahagia’) atau kata *awighnam astu* (‘semoga tidak ada halangan’). Adapun *manggala* yang dipergunakan sebagai ucapan pujian kepada para dewata sering ditandai dengan adanya kata *om nama iwaya* (‘sembah pujian kepada iwa’) atau *namostu sarwwabudhaya* (‘sembah kepada segenap Buddha’).

### 2. Unsur penanggalan.

Penanggalan yang terdapat pada prasasti Jawa Kuna sangat lengkap, terdiri dari unsur angka tahun, bulan, tanggal, hari, minggu, *grahacāra*, *nak atra*, *dewatā*, *ma dala*, *yoga*, *muhūrta*, *parwwe a*, *kara a*, dan *ra i*. Penulisan angka tahun dalam prasasti ditandai dengan adanya kata *akawar ātīta* diikuti dengan angka tahun. *akawar ātīta* dibentuk dari kata *aka*, *war a* (tahun), dan *ātīta* (yang telah lewat), sehingga kalimat itu berarti ‘tahun aka yang telah lewat’. Dalam penanggalan Jawa Kuna terdapat 12 bulan dalam satu tahunnya, masing-masing bernama *Caitra* (Maret-April), *Wai akha* (April-Mei), *Jye a* (Mei-Juni), *Asada* (Juni-Juli), *rawana* (Juli-Agustus), *Bhadrawada* (Agustus-September), *Asuji* (September-Oktober), *Karttika* (Oktober-November), *Mārgga ira* (November-Desember), *Posya* (Desember-Januari),

*Magha* (Januari-Pebruari), dan *Phalguna* (Pebruari-Maret). Penulisan bulan pada prasasti biasanya diikuti oleh kata *māsa* (bulan), misalnya *Caitramāsa* (Damais, 1951:11).

Penunjukan tanggal (*tithi*) dalam prasasti Jawa Kuna terdiri atas dua bagian. Bagian pertama menunjukkan angka tanggal kemudian diikuti bagian kedua yang menunjukkan keadaan bulan yaitu *uklapaksa* (paruh terang), atau *k apaksa* (paruh gelap). Paruh terang adalah tanggal permulaan munculnya bulan hingga purnama, sedangkan paruh gelap adalah setelah purnama hingga habisnya bulan. Dengan demikian, keduanya bergantian setiap setengah bulan sekali, oleh karena itu, angka tanggal Jawa Kuna hanya mulai dari angka 1 sampai 15 yang masing-masing disebut sebagai *pratipāda* (1), *dwitīyā* (2), *treṭīyā* (3), *caturthī* (4), *pañcamī* (5), *a ṭ* (6), *saptamī* (7), *a amī* (8), *nawamī* (9), *da amī* (10), *ekādasī* (11), *dwādasī* (12), *trayodasī* (13), *caturdasī* (14), dan *pañcadasī* (15) (Damais, 1951:13; Casparis, 1978:50).

Penyebutan hari pada masyarakat Jawa Kuna dikenal ada tiga macam penamaan hari, masing-masing berdasarkan atas lama siklus yang berbeda, yaitu 5 hari (*pañcawāra*), 6 hari (*sadwāra*), dan 7 hari (*saptawāra*). Siklus 5 hari terdiri atas *Pahing* (disingkat Pa), *Pon* (Po), *Wagai* (Wa), *Kaliwuan* (Ka), dan *Umanis* (U). Siklus 6 hari terdiri atas *Tunglai* (disingkat Tu/Tung), *Haryang* (Ha), *Wurukung* (Wu), *Paniruan* (Pa), *Was* (Wa), dan *Mawulu* (Ma). Sedangkan siklus 7 hari adalah *Āditya* (disingkat Ā = Minggu), *Soma* (So = Senin), *Anggārā* (Ang = Selasa), *Buddha* (Bu = Rabu), *Bhrehaspati/Wrehaspati* (Bre/Wre = Kamis), *ukra* ( u = Jum'at), dan *anaiscara* ( a = Sabtu). Urutan penulisan ketiga *wāra* dalam prasasti adalah *sadwāra*, *pañcawāra*, dan *saptawāra* serta diikuti dengan kata *wāra* (Casparis, 1978:3). Sedangkan satu minggu disebut satu *wuku*, yang terdiri dari 7 hari (*saptawāra*). Pada masyarakat Jawa Kuna dikenal 30 *wuku* yang masing-masing mempunyai nama tersendiri. Jadi, setahun terdiri dari 210 hari (Damais, 1951:16-17; Casparis, 1978:57).

*Grahacāra* menunjukkan letak kedudukan planet-planet. Zoetmulder (1982:541) masih meragukan apakah letak kedudukan itu dikaitkan dengan posisi zodiak. Letak kedudukan *grahacāra* ditunjukkan dengan menyebut arah mata angin, yaitu *purwwa* (timur), *dak ina* (selatan), *pa ima* (barat), *uttara* (utara), *ai anyā* (timur laut), *agneya* (tenggara), *nairiti* (barat daya), dan *bayabya* (barat laut).

*Nak atra* artinya bintang atau gugusan bintang. Dengan demikian penyebutan *nak atra* dalam prasasti adalah bintang atau gugus bintang yang terlihat pada saat tertentu. Di dalam astronomi Jawa Kuna terdapat 27 nama *nak atra*, dan seluruhnya bersiklus 322 hari. Nama beserta konstelasinya dari setiap *nak atra* dapat dibaca dalam naskah *Agastyaparwa* (Gonda, 1933: 329-419). Sedangkan *dewatā* adalah perhitungan penanggalan yang menggunakan nama-nama dewa yang dipercayai menguasai dan mengawasi dalam kurun waktu tertentu.

*Ma dala* adalah istilah astronomi yang dipergunakan untuk menyebut bagian-bagian tertentu dari langit ketika konstelasi *nak atra* berada pada waktu matahari terbit. *Ma dala* menggunakan nama-nama dewa pengawas dari setiap bagian langit tersebut. Misalnya *mahendra- ma dala* untuk bagian timur, *agneya- ma dala* untuk bagian tenggara, dan sebagainya (Casparis, 1978:23). *Yoga* menunjuk pada “waktu selama matahari dan bulan bergerak untuk bertemu pada titik 13 20’.” Jumlah *yoga* ada 27, yang

keseluruhannya bersiklus 25,420 hari. Nama-namanya antara lain *Siddhi, Sobhama, Subha, Siwa, Wyapati, Indra, Dh ti, Waskambha, Ayusman, Parigha, Atiganda, Priti, Harsana, Brahma, Bajra, dan Sukla*(Mardiwarsito, 1981:716).

*Muhûrtta* adalah suatu kesatuan waktu, satu *muhûrtta* lamanya 48 menit. Satu hari (24 jam) terdiri atas 30 *muhûrtta*, masing-masing *muhûrtta* mempunyai nama tersendiri (Casparis, 1978:54). *Parwwe a* merupakan penyebutan untuk menandai pengawas suatu konstelasi bintang. Nama *parwwe a* dalam prasasti antara lain *Brahma-parwwe a, Sa i-parwwe a, dan Baruna-parwwe a*(Zoetmulder, 2000:1309). *Kara a* untuk menyebut suatu periode waktu yang lamanya 0,492 hari atau kira-kira setengah hari. Masyarakat Jawa Kuna mengenal 7 *kara a*, yaitu *Visti, Bava, Valava, Kaulava, Taitala, Gara, dan Vanija*(Casparis, 1978:23 dan 51). *Ra i* atau zodiak yang dikenal masyarakat Jawa Kuna berjumlah 12, yaitu *Mîna* (Pisces), *Me a* (Aries), *V abha* (Taurus), *Mithuna* (Gemini), *Karka* (Cancer), *Simha* (Leo), *Kanyã* (Virgo), *Tulã* (Libra), *V cika* (Scorpio), *Dhanu* (Sagittarius), *Makara* (Capricornus), dan *Kumbha* (Aquarius) (Casparis, 1978:54; Zoetmulder, 2000:1517).

Contoh penulisan penanggalan yang lengkap seperti di atas tertulis pada prasasti Tuhañaru 1323 M (Boechari dan Wibowo, 1986:78) yang berbunyi sebagai berikut:

“//o// swasti rî akawar āfita. 1245. mār̥gga iramāsa. Tithi pañcadasî uklapaksa. tung. u. ang. wāra. krulwut. p rrwastha grahacāra. adra nak atra. rudradewatā. bār̥unama dala. brahmayoga. w jayamuh r̥rta. yama parwwe a. wawakara a. mithuna ra i....”

(“//o// Selamat berbahagia, tahun aka telah melewati tahun 1245, pada bulan *Mār̥gga ira*, tanggal 15 paruh terang, hari *Tunglai, Umanis, Anggara* (Selasa), *wuku krulwut*, kedudukan planet berada di sebelah timur, gugusan bintang yang terlihat adalah *adra*, di bawah pengaruh Dewa Rudra, diawasi oleh Dewa Bār̥una sebagai penjaga mata angin sebelah barat, *brahma yoga*, *w jaya muh r̥rta*, diawasi oleh Dewa Yama, *wawa kara a*, pada naungan bintang Gemini....”)

Urutan tahun, bulan, tanggal, dan hari untuk setiap prasasti selalu sama, tetapi untuk penyebutan astronomi tidak selalu sama urutannya. Bahkan ada beberapa prasasti yang unsur astronominya tidak lengkap. Prasasti-prasasti yang berasal dari sebelum abad XI M jarang menuliskan unsur astronominya, biasanya penyebutan penanggalannya hanya sampai pada hari atau nama minggunya (Casparis, 1978:56).

### 3. Kejadian yang diperingati

Kejadian yang diperingati pada prasasti bermacam-macam. Seperti yang telah dikemukakan di atas, *yupa* di Kutai memperingati kedermawanan Mulawarman dalam memberikan sedekah pada upacara keagamaan yang diselenggarakan oleh para brahmana. Sedangkan sebagian besar prasasti dari Kerajaan Mataram Hindu, memperingati ditetapkannya suatu daerah menjadi berstatus *sima*. Meskipun demikian, ada juga prasasti-prasasti yang memperingati tentang ketetapan hukum. Bahkan dari prasasti-prasasti itu, dapat diketahui proses peradilan hukum dari warga yang mempunyai masalah hingga pejabat-pejabat yang berwenang untuk memutuskan perkara itu. Contohnya prasasti Wurudu Kidul 922 M yang memuat persengketaan mengenai status kewarganegaraan seseorang yang bernama Sang Dhanadi yang tinggal di

Wurudu Kidul. Ia dituduh sebagai *wka kilalan*<sup>6</sup> dari daerah Manghuri oleh *Sang Pamgat* di Manghuri yang bernama Pu Wukajana. Karena ia merasa bukan *wka kilalan*, maka ia mengajukan persoalan ini kepada *Sang Tuhan* (penguasa wilayah) di Padang yang terletak di daerah Pakaranan, setelah sebelumnya menghadap *Pamgat* (pejabat kehakiman) di Padang. Setelah diadakan penyelidikan terhadap leluhur Sang Danadi, berikut dihadirkan juga saksi-saksi dari penduduk asli di Wurudu Kidul, ternyata memang benar bahwa Sang Danadi adalah penduduk asli dan bukan *wka kilalan*. Kasus-kasus hukum yang terjadi pada masyarakat Jawa Kuna ternyata bermacam-macam tidak hanya masalah kewarganegaraan saja. Misalnya, prasasti Luitan 901 M dan prasasti Palêpangan 906 M, yang berisikan persengketaan terhadap luas tanah milik para warga desa yang dikatakan melebihi ukuran yang sesungguhnya. Hal ini mengakibatkan pembayaran pajak yang berlebih, sehingga memberatkan warga yang harus membayarnya. Ada juga prasasti yang memperingati dibuatnya bendungan untuk menyejahterakan pertanian rakyat seperti yang tertuang pada prasasti Tugu dari Kerajaan Tarumanāgara, prasasti Hariñjing A 787 M, dan prasasti Kamalagyan pada masa pemerintahan Airlangga. Selain itu masih terdapat banyak kasus-kasus lain yang dapat diperoleh dari data prasasti.

#### **4. Sambandha**

Khusus untuk prasasti yang berisi tentang *sima*, terdapat istilah *sambandha*, yaitualasan ditetapkannya suatu daerah menjadi berstatus *sima*. Alasan-alasan itu dapat terjadi karena (1) merupakan balas jasa dari seorang penguasa kepada seseorang atau beberapa orang pejabat, atau bahkan kepada penduduk suatu daerah yang telah berjasa kepada raja atau kerajaan; (2) karena daerah itu diperintahkan untuk memelihara bangunan suci atau yayasan keagamaan; (3) karena permohonan rakyat; atau (4) karena karena perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang sehingga dapat dijadikan teladan bagi orang lain. Setelah diketahui alasan penetapan *sima*, maka dapat diketahui pula penerimanya sesuai dengan alasan penetapannya, yaitu (1) seorang pejabat atau beberapa orang pejabat; (2) penduduk desa; (3) bangunan suci atau yayasan keagamaan (Schrieke, 1975:10-14; Maziyah, 1992:3).

#### **5. Keterangan luas tanah dan batas-batas wilayah**

Pada prasasti-prasasti tentang *sima*, keterangan luas tanah dan batas-batas wilayah sangat penting artinya. Karena kedua hal tersebut menentukan luas daerah yang dikelola serta jumlah pemasukan daerah setempat. Oleh karena itu, diperlukan batas-batas yang jelas terhadap wilayah yang menjadi hak penerima *sima*. Daerah yang ditetapkan menjadi *sima* dapat berupa sawah, kebun, desa atau beberapa desa, atau bahkan sebuah hutan karena adanya alasan tertentu.

#### **6. Daftar nama pejabat penerima *pasak-pasak* (persembahan)**

---

<sup>6</sup>*Wka kilalan* menunjuk pada suatu kelompok masyarakat Jawa Kuna yang wajib membayar pajak, termasuk di dalamnya adalah warga asing yang menetap di Jawa.

Pada upacara penetapan suatu daerah menjadi berstatus *sima*, selalu dibagikan persembahan kepada para penguasa kerajaan, dimulai dari raja kemudian pejabat-pejabat dibawahnya hingga pejabat desa yang bersangkutan serta pejabat desa tetangga yang mengikuti upacara itu. Persembahan yang diberikan itu bervariasi dalam jenis maupun jumlahnya. Misalnya logam mulia berupa emas, perak, perunggu, dan besi dalam berbagai bentuk cincin atau gelang, berbagai jenis kain (*ganjar patra, ra ga, a sit*, dan lain-lain), binatang ternak (kerbau, kambing, atau celeng), serta sejumlah uang. Pejabat tertinggi mendapat jenis yang paling baik serta jumlah yang paling banyak, sedangkan tingkat jabatan dibawahnya menyesuaikan sesuai dengan tingkat jabatan masing-masing. Dengan demikian, melalui urutan penyebutan pejabat yang menerima persembahan ini berikut besar-kecilnya persembahan yang diterima dapat diketahui kedudukan para pejabat dalam suatu hierarki pemerintahan pada kerajaan itu. Biaya yang ditimbulkan pada upacara itu ternyata banyak sekali. Meskipun demikian, tidak semua tempat memberikan jumlah dan jenis yang sama. Hal ini diakibatkan oleh kemampuan ekonomi masing-masing daerah tidak sama. Sedangkan dari jumlah undangan yang menerima hadiah dapat diketahui luas wilayah daerah *sima* tersebut (Brandes, 1913; Boechari dan Wibowo, 1986; Wurjantoro, 2011;2012).

## 7. Daftar saji-sajian

Saji-sajian pada upacara penetapan *sima* sangat beragam, dari berbagai jenis bunga, daun, makanan, dan sebagainya. Dari penyebutan saji-sajian ini dapat diketahui berbagai jenis tumbuhan dan jenis makanan serta minuman yang digunakan sebagai pelengkap upacara. Ada dua jenis saji-sajian, yaitu saji-sajian untuk perlengkapan upacara tersebut (*sesajen*) dan saji-sajian atau hidangan untuk dinikmati oleh semua peserta upacara. Misalnya seperti yang terdapat pada prasasti Lintakan 919 M *sesajennya* berupa 5 ekor ayam hitam, telur, tepung berwarna putih dan kuning, bunga-bunga, dupa, lampu, dan *jenu* (semacam boreh untuk mendapatkan kekuatan magis) (Wurjantoro, 2012:225).

Adapun hidangan untuk para peserta upacara penetapan *sima* itu antara lain disebutkan oleh prasasti Rukam 907 M II.7-10 (Nastiti, dkk., 1982:25) berupa nasi tumpeng, makanan yang ditim bertumpuk-tumpuk, makanan yang dibakar di atas arang, dendeng kakap, ikan *ka iwas*, ikan duri, dendengtawar, ikan *kawan*, kerang, keong, *hala-hala* (semacam lauk), udang, ikan gabus, ikan deleg goreng, telur, dan kepiting. Adapun sayurnya terbuat dari daging kerbau, daging sapi, dan daging babi. Ada pula lalapan mentah, *kasya-kasyan*, makanan yang disangrai, sayur, daging babi cincang, urap, *dhudhutan* (sebangsa nama masakan), dan petis. Minumannya meliputi tuak, *siddhu* (minuman keras yang dibuat dari tebu), dan *cinca* (air gula).

## 8. Upacara penetapan *sima*

Rangkaian upacara penetapan *sima* dilakukan oleh seluruh undangan yang terdiri dari para pejabat kerajaan, kepala desa–kepala desa tetangga, pejabat daerah setempat beserta seluruh rakyat di daerah itu. Selain pesta makan bersama, pada saat itu seringkali juga diselenggarakan acara kesenian seperti

pertunjukan wayang (*awayang*), tari-tarian (*kicaka*), tembang (*namwang*), dan tak lupa tampil pula badut-badut maupun pelawak (*abañol*) untuk menghibur para peserta upacara.

### 9. Pengucapan sumpah atau *sapatha*

Puncak upacara penetapan *sima* adalah pengucapan sumpah atau *sapatha* yang dilakukan oleh seorang *makudur*.<sup>7</sup> Inti pengucapan sumpah itu ditujukan kepada para pelanggar atau pengganggu *sima*. Mereka yang mengganggu atau melanggar ketentuan di daerah itu akan dikenai sanksi oleh para dewata melalui permohonan *makudur* pada waktu itu. Oleh karena itu, pada bagian akhir dari sumpah selalu dikatakan bahwa ketetapan *sima* di daerah itu berlaku untuk selama-lamanya (*dlaha ning dlaha*). Pengucapan sumpah yang didahului oleh pemanggilan dewa-dewa oleh *sang makudur* agar bersedia menyaksikan upacara itu, disertai dengan menghantamkan ayam maupun telur pada *sang hyang watu sima* hingga ayam dan telur itu hancur, untuk menunjukkan demikianlah balasan dewa-dewa jika seseorang mengganggu kedamaian penduduk dan wilayah *sima* itu seperti hancurnya ayam dan telur yang dihantamkan pada *sang hyang watu sima* (Nastiti, dkk., 1982:39).

### 10. *Citralekha*

Arti sebenarnya *citralekha* adalah penulis, yaitu penulis keputusan atau perintah raja. Keputusan itu biasanya dituliskan di atas *ripta* (lontar) terlebih dahulu, kemudian barulah digoreskan di atas batu atau pada lempengan logam. Dari berbagai temuan prasasti dapat diketahui bahwa tulisan dari para *citralekha* itu umumnya bagus-bagus. Nama penulis prasasti atau *citralekha* sering kali terdapat pada bagian akhir sebuah prasasti (Wurjantoro, 2011:4).

## C. Prasasti dan Kekuasaan

### 1. Pejabat yang Berhak Mengeluarkan Prasasti

Berdasarkan penelitian pada prasasti-prasasti, ternyata pejabat yang berhak mengeluarkan prasasti sangat terbatas, karena tidak semua orang dapat mengeluarkan maklumat penting itu, hanya orang-orang yang mempunyai kekuasaan saja yang berhak mengeluarkannya. Mereka adalah raja, putra raja, *rakai*,<sup>8</sup> *samgat*,<sup>9</sup> atau para brahmana. Dengan demikian dapat diketahui adanya hubungan antara hak mengeluarkan prasasti dengan kekuasaan pada masa Jawa Kuna. Oleh karena itu, perlu diketahui struktur

---

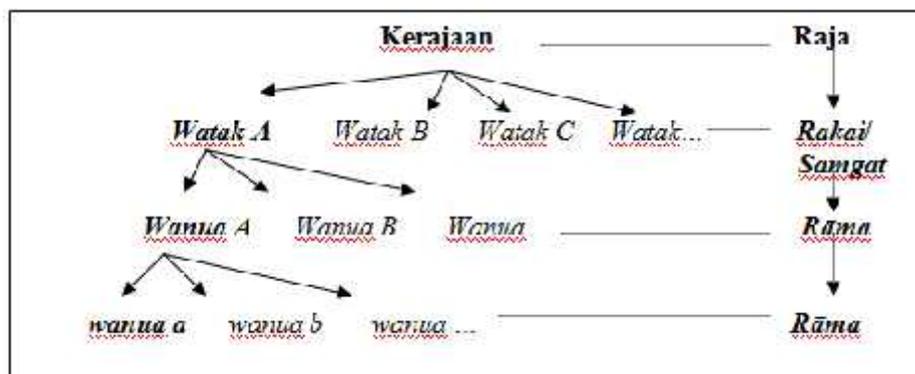
<sup>7</sup>*Makudur* adalah pejabat yang bertindak dalam mendirikan *sima*, dengan memanggil dewa-dewa dan mengucapkan kutuk terhadap para pelanggar (Zoetmulder, 2000: 527).

<sup>8</sup>*Rakai* atau *r ka* adalah penguasa wilayah *watak*.

<sup>9</sup>*Samgat* merupakan singkatan dari kata *sang pamgat*, artinya yang dapat memutuskan perkara. Jabatan ini diberikan kepada orang-orang yang menguasai masalah agama atau hukum, sehingga dapat memutuskan perkara yang terjadi pada masyarakatnya.

birokrasi di kerajaan pada masa Jawa Kuna itu, untuk mengetahui kedudukan pejabat-pejabat yang berhak mengeluarkan prasasti tersebut.

Wilayah Kerajaan Mataran Kuna terbagi atas wilayah kerajaan, wilayah *kerakaian*, dan *wanua*. Wilayah kerajaan adalah wilayah seluruh kerajaan, wilayah yang terdiri atas beberapa *kerakaian*, yang mempunyai ibu kota pusat pemerintahan dan di situlah birokrasi pusat pemerintahan dijalankan. Wilayah *kerakaian* atau daerah *watak*, adalah suatu wilayah yang terdiri atas beberapa *wanua*, yang dikuasai oleh seorang *rakai* atau seorang *sangat*. Adapun *wanua* adalah wilayah terkecil dalam suatu kerajaan, daerah ini dapat hanya terdiri atas satu desa saja atau merupakan kesatuan dari beberapa desa (Christie, 1986:70). *Wanua* dikuasai oleh seorang *rāma*. Sedangkan penduduknya disebut sebagai *anak wanua*. Kondisi pembagian wilayah itu dapat digambarkan dengan bagan alir sebagai berikut:



Gambar 3. Pembagian Wilayah Kerajaan Pada Masa Jawa Kuna  
(Sumber: Diolah dari Christie, 1986:70; Maziyah, 2008:6)

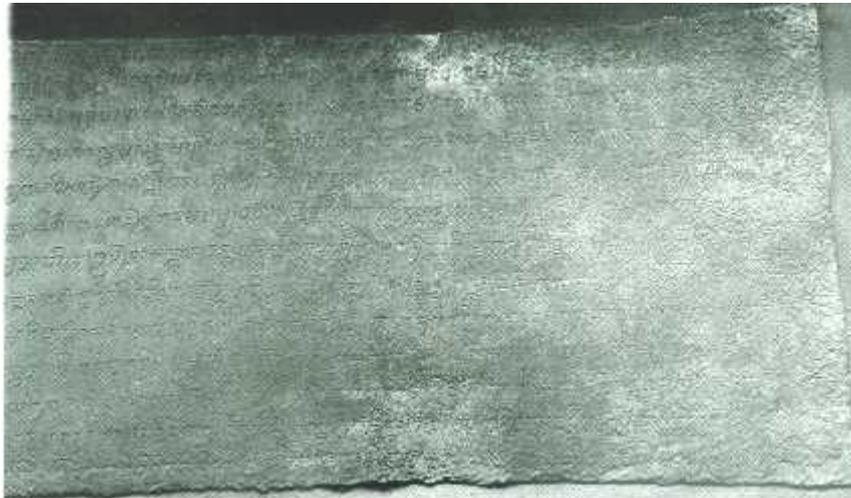
Berdasarkan gambar 3 tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa yang berhak mengeluarkan prasasti hanyalah raja dan penguasa wilayah *watak* atau *wat k* yang merupakan bawahan langsung dari kerajaan.

Perlu diperhatikan bahwa keputusan-keputusan raja di dalam prasasti itu selalu dituliskan dengan tulisan yang indah dan rapi oleh seorang *citralekha* pilihan, sedangkan pada prasasti yang bukan merupakan keputusan raja tulisannya kurang indah dan rapi. Bahkan ada prasasti yang tulisannya jelek, keadaan ini dapat ditafsirkan bahwa penulisnya bukan *citralekha* profesional. Hal ini dapat dibuktikan pada bentuk tulisan prasasti Sang Hyang Wintang dan prasasti Wayuku yang dikeluarkan oleh seorang *Rakai*, dengan bentuk tulisan prasasti T lang yang dikeluarkan oleh raja. Sepintas lalu saja sudah kelihatan bahwa prasasti T lang ditulis oleh seorang *citralekha* yang mahir, sedang kedua prasasti yang lain *citralekha*nya kurang baik. Oleh karena itu, ada prasasti yang disebut sebagai *Sang Hyang Haji Prasasti*, yang menandakan bahwa prasasti itu dikeluarkan oleh seorang raja (*haji*).

Gambar-gambar berikut ini menunjukkan jenis tulisan *citralekha*:



Gambar 4. Bentuk Tulisan Pada Prasasti Wayuku  
(Sumber: Wurjantoro, 2012:53)



Gambar 5. Bentuk Tulisan Pada Prasasti Tlang  
(Sumber: Suhadi dan Sukarto, 1986:45)

## 2. Fungsi Prasasti Pada Kekuasaan

Di dalam naskah *R m yana Kakawin* antara lain berisi uraian tentang *r jadharmma* (tugas kewajiban seorang raja), yaitu bagian yang merupakan ajaran Rāma kepada adiknya Bhārata dan kepada Wibh sana. Pada bagian ini dijumpai ajaran *astabrata*, perilaku yang delapan. Ajaran itu menyatakan bahwa di dalam diri seorang raja berpadu 8 dewa, yaitu Indra, Yama, Sûrrya, Soma, Wāyu, Kuwera, Waruna, dan Agni. Sebagai Indra, yang di dalam kitab ini masih dianggap sebagai dewa hujan, raja hendaknya selalu menghujankan anugerah kepada rakyatnya. Sebagai dewa Yama (dewa kematian) ia harus menghukum para pencuri dan semua penjahat. Sebagai dewa S rrya (dewa matahari) yang senantiasa menghisap air secara perlahan-lahan, raja hendaknya menarik pajak dari rakyatnya sedikit demi sedikit sehingga tidak memberatkan. Sebagai dewa Soma (dewa Bulan), ia harus membuat bahagia seluruh dunia dengan senyumnya yang bagaikan *am rta*. Sebagai dewa W yu (dewa Angin), ia dapat menyelusup ke tempat-tempat yang tersembunyi, raja harus selalu mengetahui hal ikhwal rakyatnya dan semua gejala di

kalangan berbagai lapisan masyarakat. Sebagai Kuwera (dewa Kekayaan), raja hendaknya menikmati kekayaan duniawi. Sebagai Waruna (dewa Laut) yang bersenjatakan jerat, raja haruslah menjerat semua penjahat. Dan sebagai Agni (dewa Api), ia harus membasmi semua musuhnya dengan segera. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa seorang raja harus berpegang teguh kepada *dharmma*, bersikap adil, menghukum yang bersalah dan memberikan anugerah kepada yang berjasa, bijaksana, tidak boleh sewenang-wenang, waspada terhadap gejolak-gejolak di kalangan rakyatnya, berusaha agar rakyat senantiasa memperoleh rasa tenteram dan bahagia, dan dapat memperlihatkan wibawanya dengan kekuatan angkatan perang dan harta kekayaannya (Poesponegoro dan Notosusasto, ed., 1993:192-193).

Berdasarkan penelitian terhadap isi prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh para penguasa pada masa Jawa Kuna, dapat diketahui bahwa isi prasasti-prasasti itu menunjukkan adanya pengamalan ajaran *astabrata* oleh para penguasa pada waktu itu. Unsur anugerah menduduki tempat terbanyak, kemudian menyusul masalah-masalah keputusan hukum, pajak, dan legitimasi kekuasaan seperti contoh prasasti-prasasti yang telah disebutkan di atas.

Anugerah adalah hak istimewa yang dimiliki oleh seorang raja untuk menunjukkan kekuasaan tertingginya. Dengan adanya anugerah dari raja, rakyat akan merasa berhutang budi kepada raja, sehingga rakyat tidak akan memberontak atau berkhianat kepada raja. Dengan adanya anugerah ini seorang raja dapat memaksakan secara halus loyalitas rakyatnya kepada raja, karena pada hakekatnya raja adalah *r ka* (penguasa wilayah *watak*) yang harus selalu bersaing dengan *r ka-r ka* lain untuk menduduki tahta tertinggi di kerajaan (Naerssen dan Iongh, 1977:41). Dengan adanya loyalitas yang bersifat sukarela dari rakyat, maka kedudukan seorang raja menjadi semakin kukuh.

Banyaknya jumlah prasasti yang dikeluarkan oleh seorang raja dapat menunjukkan kebesaran dan kekuasaan seorang raja. Sebagai contoh, Mulawarman, Raja Kerajaan Kutai, mengeluarkan 7 buah *yupa* yang semuanya bercerita tentang kedermawanannya dalam menyumbang untuk upacara keagamaan yang dilakukan oleh para brahmana. Adapun Balitung, salah satu raja Kerajaan Mataram Hindu, mengeluarkan prasasti sejumlah 28 buah yang tersebar di daerah Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Di dalam salah satu prasastinya diceritakan bahwa Balitung telah berusaha meluaskan wilayah kekuasaannya ke arah timur. Semakin banyak prasasti ditemukan, semakin banyak informasi di dapat. Dan semakin banyak prasasti ditemukan juga mengindikasikan bahwa pemerintahan dalam kondisi stabil. Pernyataan ini dapat dijelaskan pada kasus yang terjadi pada Kerajaan Janggala dan Kerajaan Kadiri yang sangat minim ditemukan prasasti karena terlalu sering terjadi perang saudara.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa prasasti adalah maklumat resmi pemerintah yang dikeluarkan oleh raja atau penguasa tinggi kerajaan yang lain yang berisi keputusan-keputusan penting kerajaan. Keputusan-keputusan yang tertulis di dalam prasasti itu sifatnya abadi. Anugerah menduduki tempat terbanyak dalam isi prasasti, kemudian menyusul

masalah-masalah keputusan hukum, pajak, dan legitimasi kekuasaan yang semuanya menunjukkan kekuasaan seorang raja dalam pemerintahan sekaligus kekuasaan seorang raja untuk “memaksakan” loyalitas rakyat terhadap dirinya. Jumlah prasasti yang dikeluarkan oleh seorang raja dapat menunjukkan kebesaran kekuasaannya dan dapat mengindikasikan stabilitas pemerintahannya.

### Daftar Pustaka

- Boechari, 1977, “Epigrafi dan Sejarah Indonesia”, *Majalah Arkeologi*, Th. I, No. 2, Jakarta: Lembaga Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- dan Wibowo, A.S., 1986, *Prasasti Koleksi Museum Nasional*, Jilid I, Jakarta: Proyek Pengembangan Museum Nasional.
- Brandes, J.L.A. , 1913, “Oud-Javaansche Orkonden Negalaten Transcripties van Wijlen Dr. J.L.A. Brandes Uitgegeven door N.J. Krom”, *VBG*, LX.
- Casparis, J.G. de, 1978, *Indonesian Chronology*, Leiden/ Koln: E.J. Brill.
- Christie, Jan Wisseman, 1986, “Negara, Mandala, and Dispotic State: Images of Early Java”, dalam David G. Marr & A.C. Milner, eds., *Southeast Asiain the 9<sup>th</sup> to 14<sup>th</sup> Centuries*, Singapore.
- Damais, L. Ch., 1951, “Etudes D’Epigraphie Indonesienne I”, *BEFEO*, XLV.
- Gonda, J. , 1933, “Agastyaparwa, Een Oud-Javaansch Proza-geschrift”, *BKI*, 90.
- , 1952, *Sanskrit in Indonesia*, Nagpur.
- Haryana, Timbul, 1980, “Gambaran Tentang Upacara Penetapan *Sima*”, *Majalah Arkeologi*, Th. III, No. 1-2, Jakarta: Lembaga Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Naerssen, F.H. van dan Iongh, 1977, R.C. de, “The Economic and Administrative History of Early Indonesia”, *Handbuch der Orientalistik*, 7ter band, Leiden/Koln: E.J. Brill.
- Mardiarsito, L. , 1981, *Kamus Jawa Kuna Indonesia*, Ende: Nusa Indah.
- , Dewi, Dyah Wijaya, Kartakusuma, Richadiana, 1982, *Tiga Prasasti dari Masa Balitung*, Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta Departemen P & K.
- Maziyah, 1992, “Pembatasan Usaha Perdagangan di Daerah *S ma* Pada Abad X Masehi, Tinjauan Berdasarkan Kedudukan Daerah *S ma*”, Skripsi pada Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.
- , 2008, “Daerah Otonomi Pada Masa Kerajaan Mataram Kuna”, *Paramita*, Vol. 18, No. 1, Semarang: Jurnal Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- Poesponegoro, Marwati Djoenet, dan Notosusasto, Nugroho, ed. , 1993, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid II, Edisi IV, Cetakan VIII, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prasodjo, Tjahjono, 1987, “Prasasti Peradilan: Analisis Struktural dan Tinjauan Pelaksanaan Hukum Jawa Kuna”, Skripsipada Jurusan Arkeologi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- Schrieke, B.J.O., 1975, *Sedikit Uraian tentang Pranata Perdikan*, Seri Terjemahan, Jakarta: Bhratara.
- Soebadio, Haryati, 1983, *Tatabahasa Sanskerta Ringkas*, Cetakan II, Jakarta: Djambatan.
- Suhadi, Machi dan Soekarto, M.M., 1986, "Laporan Epigrafi Jawa Tengah", *Berita Penelitian Arkeologi*, No. 37, Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wurjantoro, Edhie, 2011, *Prasasti Berbahasa Jawa Kuno Abad VIII-X Masehi Bukan Koleksi Museum Nasional Jakarta* (alih aksara dan terjemahan), Depok.
- , 2012, *Prasasti Berbahasa Jawa Kuno Abad VIII-X Masehi Koleksi Museum Nasional Jakarta* (alih aksara dan terjemahan), Depok.
- Zoetmulder, P.J., 1982, *Old-Javanese English Dictionary*, The Hague: Martinus Nijhoff.
- , 1985, *Kalangwan: Sastra Jawa Kuno Selayang Pandang*, Seri ILDEP di bawah redaksi W.A.L. Stokhof, Penerjemah: Dick Hartoko SJ., Cetakan ke-2, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- , 2000, *Kamus Jawa Kuna-Indonesia*, Terjemahan: Darusuprpto dan Sumarti Suprayitno, Cetakan III, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.